

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2018**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**



**DPMPTSPD KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

(Kompleks Kantor Bupati)
Alamat : Jln. Bumi Nangka. KOLONODALE Kode Pos – 94671

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, 2019

Pit. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,



ROMEL ERWIN TUNGKA, SPt
NIP.1973072 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jln. Bumi Nangka - Kolonodale Kode Pos 94671
e-mail : dpmtsp.morut@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara kepada Bupati Morowali Utara tidak hanya mempertanggungjawabkan keberhasilan kinerja dan kegagalan terhadap program/kegiatan tetapi juga memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Morowali Utara.

Sebagaimana tujuan dan sasaran Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyusunan dan pelaksanaan bidang Penanaman Modal bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik antara unit SKPD terkait di Kabupaten Morowali Utara dan Kementerian vertikal.

Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara, seluruh kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta telah mencapai seluruh sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2018. Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara akan menjadi bagian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang keberhasilan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018.

Kolonodale, Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah Kabupaten Morowali Utara



Drs. HANS B. LASANI
Pembina Tkt I, IV/b

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	<i>i</i>
Daftar Isi	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Permasalahan Utama / Issue Strategis.....	2
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis 2016-2021	4
2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	4
2.3 Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD).....	5
2.3.1 Visi.....	5
2.3.2 Misi.....	5
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	6
1.2.1 Tujuan.....	6
2.3.2 Sasaran.....	6
1.3 Indikator Kinerja Utama.....	7
2.5 Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	13
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	31
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Langkah Kedepan.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis dibidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta RENJA sesuai dengan RENSTRA 2016-2021.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan, telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Pada Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa, baik tingkat Kabupaten maupun sektoral/lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2018 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 dan 4 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas.

1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal membawahi :
1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.
 2. Seksi Perizinan II
 3. Seksi Perizinan III
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi :
1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1.3. Permasalahan Utama/Issue Strategis

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara
2. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang terkini.
3. Belum semua pelaku usaha (investor) membuat laporan (LKPM) melalau kepada DPMPTSPD.

4. Terlalu banyaknya perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasi
5. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016-2021

Rencana Strategis Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal-hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Renstra yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sebagai Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan fungsi layanan perizinana dan penanaman modal rencana strategis tersebut dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan capaian rencana kerja tahunan (RKT) sehingga adanya sinergitas capaian yang dicapai terhadap program kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu pada Rencana Strategis harus mendukung capaian program yang meliputi ijin yang diterbitkan, nilai investasi, dan potensi investasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Morowali Utara.

2.2 Sistematisa telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Morowali Utara, Dinas Penanaman Modal dan PTSPD berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara lima tahun kedepan 2016-2021 yaitu “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang Sejahtera dan Berdaya Saing Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional” dengan misi :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang professional.
2. Meningkatkan infrastruktur daerah dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang inklusif.
6. Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan
7. Mengentaskan kemiskinan dan pinggiran

2.3. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD)

2.3.1. Visi

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuanyang ingin icapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interpretasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensiyang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas di antara berbagai sumber daya serta partisipatif seluruh stakeholder, maka Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dirumuskan sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pelayanan Prima Guna Menciptakan Iklim Investasi Menuju Morowali Utara yang Sejahtera dan Berdaya Saing”

2.3.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi, maka di rumuskan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, cepat, tepat dan berkualitas.
2. Melakukan kerjasama Teknis Antar Perangkat Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Mewujudkan tata cara kelola pemerintah yang bersih (Clean Government) dan baik (Good Government).
4. Menyediakan informasi potensi daerah dalam rangka penanaman modal.
5. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam Persaingan Global

2.4 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan di tetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta di dasarkan pada isu-isu strategis.

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nayat oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang di tetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 sebanyak 6 (Enam) sasaran strategis.

Tabel 2.1

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesioanl dan kompeten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan public mencapai level “memuaskan “ 2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur 3. Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur 4. Meningktnya kinerja PNS
2.	Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA) 2. Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu

2.5 Indikator Kinerja Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara.

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI IKU
1.	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik mencapai level "Memuaskan"	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah - Pengadaan meubeleur 	<p>Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan x 100%</p> <p>Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan x 100%</p> <p>Jumlah koordinasi dan konsultasi yang tersedia/jumlah koordinasi dan konsultasi yang ditargetkan x 100%</p> <p>Jumlah meubeleur yang tersedia/jumlah meubeleur yang ditargetkan X 100%</p>
2.	Meningkatkan kualitas Aparatur SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis pelayanan publik - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 	Jumlah aparatur yang berkualitas/jumlah aparatur x 100%
3.	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur SDM	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakain dinas yang tersedia/jumlah pakaian dinas yang ditargetkan x 100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi

	mencapai level “rata-rata baik” untuk setiap SKPD dan LAKIP daerah dengan nilai B	SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	kinerja SKPD yang tersedia/jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar yang di targetkan x 100%. Jumlah laporan keuangan yang tersedia/jumlah laporan keuangan yang di targetkan x 100%.
5.	Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA)	- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal - Sosialisasi perizinan dan penanaman modal. - Penyelenggaraan Pameran Investasi - Pengawasan dan Pengendalian kegiatan perizinan dan penanaman modal - Penyediaan sarana publikasi perizinan	Jumlah Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal Yang tersedia/jumlah kegiatan Pemantuan pembinaan dan pengwasan penanaman Modal yang di targetkan x 100 % Jumlah Sosialisasi perizinan dan Penanaman Modal yang tersedia/jumlah sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal yang ditargetkan X 100% Jumlah Kegiatan Pameran Investasi Yang dilaksanakan/jumlah kegiatan pameran yang ditargetkan X 100% Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal Yang tersedia/jumlah Kegiatan yang ditargetkan X 100% Jumlah sarana Publikasi Perizinan Yang tersedia/jumlah sarana yang ditargetkan X 100%

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan potensi unggulan daerah - Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman modal - Koordinasi Pengaduan, Kebijakan, dan pelaporan layanan perizinan 	<p>Jumlah data Pengembangan potensi unggulan daerah/ jumlah yang data yang di targetkan x 100%</p> <p>Jumlah Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman modal/ jumlah Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman modal x 100%</p> <p>Jumlah Kegiatan Koordinasi pengaduan kebijakan yang dilaksanakan/jumlah kegiatan koordinasi pengaduan kebijakan yang ditargetkan X 100 %</p>
6.	Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Perizinan dan Non Perizinan - Sinkronisasi data Perizinan Dan Non Perizinan Kewenangan Provinsi - Sosialisasi dan Publikasi Terhadap Pelayanan Publik 	<p>Jumlah pendataan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan/jumlah kegiatan yang ditargetkan X 100%</p> <p>Jumlah sinkronisasi data perizinan dan non perizinan kewenangan provinsi yang dilaksanakan/jumlah kegiatan sinkronisasi data perizinan dan Non perizinan kewenangan provinsi yang ditargetkan X 100%</p> <p>Jumlah kegiatan sosialisasi dan publikasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan/jumlah kegiatan sosialisasi dan publikasi terhadap pelayanan publik yang ditargetkan X 100%</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal - Pengumpulan data dan penanganan pengaduan izin dan kebijakan - Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi - Penyusunan SOP perizinan - Sosialisasi perizinan dan penanaman modal - Sistem E-Perizinan 	<p>Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal dilaksanakan/jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang ditargetkan X 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pengumpulan data dan penanganan pengaduan izin dan kebijakan yang dilaksanakan/jumlah kegiatan pengumpulan data dan penanganan pengaduan izin dan kebijakan yang ditargetkan X 100%</p> <p>Jumlah kegiatan memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi yang dilaksanakan/jumlah kegiatan memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi yang ditargetkan X 100%</p> <p>Jumlah dokumen SOP yang tersedia</p> <p>Jumlah kegiatan sosialisasi perizinan dan penanaman modal yang dilaksanakan/jumlah kegiatan sosialisasi perizinan dan penanaman modal yang ditargetkan X 100%</p> <p>Jumlah aplikasi sistem E-Perizinan</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 menetapkan 6 (enam) sasaran dan 17 (tujuh belas) indikator yang ditargetkan mampu mempercepat visi pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Adapun sasaran utama dan kinerja yang diharapkan terwujud pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3
Penetapan Kinerja DPMPTSPD Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik mencapai level "Memuaskan"	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	100%
2.	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	Presentase PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	90%
3.	Meningkatnya kedisiplinan SDM Aparatur	Jumlah Aparatur yang menerima Reward setiap tahun	90%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level "rata-rata baik" untuk setiap SKPD dan LAKIP daerah dengan nilai B	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah	100%
5.	Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA)	Realisasi PMDN dan PMA	10%
6.	Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu	Jumlah informasi dan Izin yang dikeluarkan	82%

Program dan Kegiatan	Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
a. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp.544.100.000
b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 498.204.034
c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp.165.735.200
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	
a. Pengadaan meubelair	Rp.46.135.000
3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
a. Pengembangan potensi unggulan daerah	Rp.40.000.000
b. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Rp.29.650.000
c. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Rp.104.941.235
d. Penyelenggaraan pameran investasi	Rp.610.803.806
e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan penanaman modal	Rp.108.902.600
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
a. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Rp.51.500.000
b. Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Rp.82.370.700
5. Program peningkatan kualitas pelayanan publik	
a. Pendataan perizinan dan non perizinan	Rp.65.607.300
b. Sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	Rp.87.389.750
c. Sistem informasi E- perizinan	Rp.182.550.000
d. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan	Rp.133.000.000
e. Koordinasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan	Rp.54.250.000
f. Sosialisasi perizinan dan penanaman modal	Rp.72.103.950
g. Pengumpulan data dan penanganan pengaduan izin kebijakan	Rp.95.212.250
h. Sosialisasi dan publikasi terhadap pelayanan publik	Rp.33.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mengalami pergeseran Program dan Kegiatan, sehingga berpengaruh pada pengukuran Indikator Kinerja. Adapun Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 dapat menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2018 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.1

**Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	FORMULASI IKU
1.	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik mencapai level "Memuaskan"	- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan x 100%
		- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	99,97%	99,97%	Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan x 100%
		- Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	100%	100%	100%	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang tersedia/jumlah koordinasi dan konsultasi yang ditargetkan x 100%
		- Pengadaan meubeleur	100%	100%	100%	Jumlah meubeler yang ditargetkan/jumlah meubeler yang ditargetkan x 100%
2.	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	- Bimbingan Teknis pelayanan publik	-	-	-	Jumlah aparatur yang berkualitas/jumlah aparatur x 100%
		- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah sosialisasi perundang-undangan/jumlah sosialisasi x 100%
3.	Meningkatnya kedisiplinan SDM Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	-	-	-	Jumlah pakaian dinas yang tersedia/jumlah pakaian dinas yang ditargetkan x 100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level "rata-rata baik" untuk setiap SKPD dan LAKIP daerah dengan nilai B	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia/jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar yang ditargetkan x 100%.
		- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	Jumlah laporan keuangan yang tersedia/jumlah laporan keuangan yang ditargetkan x 100%.
5.	Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA)	- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan	100%	99,99%	99,99%	Jumlah Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal Yang tersedia/jumlah

		penanaman modal				kegiatan Pemantuan pembinaan dan pengawasan penanaman Modal yang di targetkan x 100 %
		- Sosialisasi perizinan dan penanaman modal.	100%	99,97%	99,97%	Jumlah Sosialisasi perizinan dan Penanaman Modal yang tersedia/jumlah sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal yang ditargetkan X 100%
		- Penyelenggaraan Pameran Investasi	100%	93,55%	93,55%	Jumlah Kegiatan Pameran Investasi Yang dilaksanakan/jumlah kegiatan pameran yang ditargetkan X 100%
		- Pengawasan dan Pengendalian kegiatan perizinan dan penanaman modal	100%	100%	100%	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal Yang tersedia/jumlah Kegiatan yang ditargetkan X 100%
		- Penyediaan sarana publikasi perizinan	100%	-	-	Jumlah sarana Publikasi Perizinan Yang tersedia/jumlah sarana yang ditargetkan X 100%
		- Pengembangan potensi unggulan daerah	100%	100%	100%	Jumlah Pengembangan potensi unggulan daerah /jumlah data Pengembangan potensi unggulan daerah x 100%
		- Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman modal	100%	100%	100%	Jumlah Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman modal/jumlah terlaksananya Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman modal x 100%
		- Koordinasi Pengaduan, Kebijakan, dan pelaporan layanan perizinan	100%	100%	100%	Jumlah Kegiatan Koordinasi pengaduan kebijakan yang dilaksanakan/jumlah kegiatan koordinasi pengaduan kebijakan yang ditargetkan X 100 %

6.	Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu	- Pendataan Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	Jumlah pendataan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan/jumlah kegiatan yang ditargetkan X 100%
		- Sinkronisasi data Perizinan Dan Non Perizinan Kewenangan Provinsi	100%	99,72%	99,72%	Jumlah sinkronisasi data perizinan dan non perizinan kewenangan provinsi yang dilaksanakan/jumlah kegiatan sinkronisasi data perizinan dan Non perizinan kewenangan provinsi yang ditargetkan X 100%
		- Sosialisasi dan Publikasi Terhadap Pelayanan Publik	100%	99,59%	99,59%	Jumlah kegiatan sosialisasi dan publikasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan/jumlah kegiatan sosialisasi dan publikasi terhadap pelayanan publik yang ditargetkan X 100%
		- Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal dilaksanakan/jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang ditargetkan X 100%
		- Pengumpulan data dan penanganan pengaduan izin dan kebijakan	100%	100%	100%	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan penanganan pengaduan izin dan kebijakan yang dilaksanakan/jumlah kegiatan pengumpulan data dan penanganan pengaduan izin dan kebijakan yang ditargetkan X 100%
		- Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi	100%	100%	100%	Jumlah kegiatan memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi yang dilaksanakan/jumlah kegiatan memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi yang ditargetkan X 100%
		- Penyusunan SOP perizinan	100%	100%	100%	Jumlah dokumen SOP yang tersedia
		- Sosialisasi perizinan dan penanaman	100%	99,99%	99,99%	Jumlah kegiatan sosialisasi perizinan dan penanaman modal

		modal				yang dilaksanakan/jumlah kegiatan sosialisasi perizinan dan penanaman modal yang ditargetkan X 100%
		- Sistem E-Perizinan	100%	17,73%	17,73%	Jumlah aplikasi sistem E-Perizinan yang dilaksanakan

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Daerah adalah sebanyak 6 (enam) sasaran. Pada tahun 2018 ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2018. Ada 18 indikator kinerja yang mencapai predikat sangat baik yaitu di atas 91, dan ada

1 indikator kinerja dengan predikat sangat rendah yaitu dibawah 50.

Dari 3 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	18	Sangat Baik
2	76≤90		Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50	1	Sangat Rendah
	JUMLAH	19	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel. 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥ 90	66≥ 75	51≥ 65	≤50
1.	- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	V				
	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	99,97%	99,97%	V				
	- Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dalam dan luar daerah	100%	100%	101%	V				
	- Jumlah Meubelair yang tersedia	100%	100%	100%					
	CAPAIAN RATA-RATA			99,99 %	V				
2.	- Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	-	-	-					
	- Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	-	-	-					
	CAPAIAN RATA-RATA			-					
3.	- Pengadaan pakian dinas beserta kelengkapannya	-	-	-					
	CAPAIAN RATA-RATA								

4.	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-					
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	-					
CAPAIAN RATA-RATA				-					
5.	- Terlaksananya Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	100%	99,99%	99,99%	V				
	- Meningkatkan Pengurusan izin oleh masyarakat	100%	99,97%	99,97%	V				
	- Tersedianya referensi untuk evaluasi dan penyusunan rencana investasi dan perizinan	100%	93,55%	93,55%	V				
	- Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kegiatan promosi	100%	100%	100%	V				
	- Jumlah Ketersediaan sarana publikasi perizinan	100%	-	-					
	- Tersedianya data Potensi Unggulan Daerah	100%	100%	99,77%	V				
	- Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	100%	100%	100%	V				
	- Terlaksananya Koordinasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan	100%	100%	100%					
	CAPAIAN RATA-RATA				98,70%	V			
	6.	- Terlaksananya Pendataan perizinan dan non perizinan	100%	100%	100%	V			
- Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		100%	99,72%	99,72%	V				
- Terlaksananya Sosialisasi dan publikasi terhadap pelayanan publik di 10 Kecamatan		100%	99,59%	99,59%	V				
- Jumlah sistem informasi penanaman modal		100%	100%	100%	V				
- Terlaksananya Pengumpulan data dan penanganan pengaduan izin dan kebijakan		100%	100%	100%	V				
- Ketersediaan Kerjasama di bidang investasi		100%	100%	100%	V				
- Tersedianya SOP perizinan		100%	100	100%	V				
- Jumlah ketersediaan sarana informasi pelayanan perizinan		100%	17,73%	17,73%	V				

	CAPAIAN RATA-RATA	90,78%	V				
--	--------------------------	---------------	----------	--	--	--	--

Gambaran pencapaian kinerja dari 6 (enam) sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Dari 6 (enam) sasaran tersebut ada 3 (Tiga) sasaran yang tidak terealisasi pada tahun 2018 tetapi terealisasi pada tahun 2017 yaitu sasaran (2, 3 dan 4).

1. Sasaran Kesatu Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik Mencapai level “Memuaskan” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara.

Sasaran kesatu Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level “Memuaskan” pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari indikator yaitu; Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia, rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah dan pengadaan meubelair , pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 99,99% dengan predikat Sangat Baik.

2. Sasaran Kedua Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur pada DPMTSPD.

Sasaran kedua meningkatnya kualitas sumber daya manusia Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara yaitu; bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan, pada tahun 2018, kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam DPA DPMPTSPD.

3. Sasaran Ketiga Meningkatkan Kedisiplinan SDM Aparatur.

Sasaran ketiga meningkatkan kedisiplinan SDM Apratur pada tahun 2018, tidak dianggarkan dalam DPA DPMPTSPD.

4. Sasaran Keempat Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mencapai Level ‘rata-rata baik’ untuk Setiap SKPD dan LAKIP Daerah dengan Nilai B.

Sasaran ketiga Tersedianya meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah mencapai level “rata-rata baik” untuk setiap SKPD dan LAKIP Daerah dengan Nilai “B”, pada tahun 2018 tidak dianggarkan dalam DPA DPMPTSPD.

5. Sasaran Kelima Meningkatkan Jumlah Investasi Daerah (PMDN dan PMA).

Sasaran kelima meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA) dengan 6 (enam) indikator yaitu: Peningkatan kegiatan pemantauan peningkatan, pembinaan dan penanaman modal, sosialisasi perizinan dan penanaman modal, penyelenggaraan pameran investasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan perizinan dan penanaman modal, penyediaan sarana publikasi perizinan, koordinasi pengadaan kebijakan dan pelaporan layanan perizinan, dengan pencapaian kinerja rata-rata 98,70% dengan predikat Sangat Baik.

6. Sasaran Keenam Meningkatnya Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran keenam meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu dapat dilihat dari 8 indikator yaitu; pendataan perizinan dan non perizinan, sinkronisasi data perizinan dan non perizinan kewenangan investasi, sosialisasi dan publikasi terhadap layanan publik, pengembangan sistem informasi penanaman modal, pengumpulan data dan penanganan pengaduan ijin dan kebijakan, memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi, penyusunan SOP perizinan, sistem E-Perizinan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, pada tahun 2018 dengan pencapaian kinerja rata-rata 90,78 % dengan predikat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2018.

Perbandingan laporan kinerja Tahun 2018 merupakan tahun ketiga Renstra/RPJMD tahun 2016-2021. Tahun 2018 format penyusunan LAKIP sesuai petunjuk dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mengalami perubahan sehingga pada tahun 2018 susunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara menuangkan 6 sasaran dan 17 indikator kinerja kegiatan. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2017 sampai dengan 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017-2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2017 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2018 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%)
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik mencapai level "Memuaskan"	- Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	95%	95%	1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik mencapai level "Memuaskan"	- Tersedianya jasa dan perlengkapan kantor - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah - Pengadaan Meubelair	100% 99% 100% 100%	100% 99% 100% 100%
2	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	Presentase PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural dan	100%	98%	2. Terwujudnya Kualitas Sumber daya	- Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	-	-

		Fungsional			manusia.	- Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dikikuk	-	-
3	Meningkatnya kedisiplinan SDM Aparatur	Jumlah Aparatur yang menerima Reword Setiap tahun naik	90%	100%	3. Terwujudnya pelayanan Informasi bagi Masyarakat	- Jumlah Meubelair yang diadakan	-	-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level "rata-rata baik" untuk setiap SKPD dan LAKIP daerah dengan nilai B	Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintah	100%	100%	4. Tersedianya data kajian penelitian kominfo	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	-	-
						- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-
5	Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA)	Realisasi PMDN dan PMA	100%	85%	5. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level memuaskan	- Terlaksananya n Peningkatan kegiatan pemantauan, p embinaan, dan pengawasan penanman modal	99%	99%
						- Meningkatnya pengurusan izin oleh masyarakat dan penanaman modal.	100%	100%
						- Keikutertaan Pemerintah Darah dalam kegiatan promosi	93%	93%
						- Tersedianya referensi untuk evalasi dan penyusunan renana investasi dan perizinan	100%	100%
						- Jumlah ketersediaan sarana publikasi perizinan	-	-
						- Tersedianya data potensi unggulan daerah	100%	100%
						- Terlaksananya Koordinasi perencanaan dan pengembanga n Penanaman modal	100%	100%
						- Terlaksananya Koordinasi Pengaduan, Kebijakan, dan pelaporan layanan perizinan	100%	100%

6	Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu	Jumlah informasi dan izin yang dikeluarkan	100%	90%	6. Terwujudnya kerjasama dengan mas media	- Terlaksananya koordinasi bidang ekonomi	100%	100%
						- Tersedianya dokumen rencana pembangunan industri Kabupaten	99%	99%
						- Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Terhadap Pelayanan Publik di 10 Kecamatan	99%	99%
						- Jumlah sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%
						- Terlaksananya Pengumpulan data dan penanganan pengaduan izin dan kebijakan di 10 Kecamatan	100%	100%
						- Ketersediaan kerjasama dibidang investasi	100%	100%
						- Tersedianya SOP perizinan	100%	100%
						- Jumlah keterediaan sarana informasi pelayan perizinan	17,73%	17,73%

Gambaran realisasi dan pencapaian kinerja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dimana pada tahun 2017 terdapat 3 sasaran dan 15 indikator kinerja program sedangkan pada tahun 2018 terdapat 6 (enam) sasaran dan 19 indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik Mencapai level “Memuaskan” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara

Dari tabel diatas pada sasaran terwujudnya peningkatan pelayan publik mencapai level “memuaskan” dapat dengan tiga indikator yaitu; Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah , pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 99,99% dengan predikat Sangat Baik. Jika di bandingkan dengan Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja hanya 95% , yang berarti adanya kenaikan pencaian kinerja

2. Sasaran Kedua Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur pada DPMTSPD.

Sasaran kedua meningkatnya kualitas sumber daya manusia Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara yaitu; bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan, pada tahun 2017 capain kinerja sebesar 98%. Pada tahun 2018 kegiatan pada sasaran ini tidak tidak dianggarkan dalam DPA DPMPTSPD.

3. Sasaran Ketiga Meningkatkan Kedisiplinan SDM Aparatur.

Sasaran ketiga meningkatkan kedisiplinan SDM Apratur pada tahun 2017 dan 2018, tidak dianggarkan dalam DPA DPMPTSPD.

4. Sasaran Keempat Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mencapai Level ‘rata-rata baik’ untuk Setiap SKPD dan LAKIP Daerah dengan Nilai B.

Sasaran ketiga Tersedianya meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah mencapai level “rata-rata baik” untuk setiap SKPD dan LAKIP Daerah dengan Nilai “B”, pada tahun 2017 dan 2018 tidak dianggarkan dalam DPA DPMPTSPD.

5. Sasaran Kelima Meningkatnya Jumlah Investasi Daerah (PMDN dan PMA).

Sasaran kelima meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA) dengan 6 (enam) indikator yaitu: Peningkatan kegiatan pemantauan peningkatan, pembinaan dan penanaman modal, sosialisasi perizinan dan penanaman modal, penyelenggaraan pameran investasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan perizinan dan penanaman modal, penyediaan sarana publikasi perizinan, koordinasi pengadaan kebijakan dan pelaporan layanan perizinan, dengan pencapaian kinerja rata-rata 99, % dengan predikat Sangat Baik. Pada Tahun 2017 capaian realisasi hanya mencapai 85%, terjadi kenaikan capaian realisasi. Dengan adanya kenaikan capaian realisasi tersebut dapat menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

6. Sasaran Keenam Meningkatnya Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran keenam meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu dapat dilihat dari 8 indikator yaitu; pendataan perizinan dan non perizinan, sinkronisasi data perizinan dan non perizinan kewenangan investasi, sosialisasi dan publikasi terhadap layanan publik, pengembangan sistem informasi penanaman modal, pengumpulan data dan penanganan pengaduan ijin dan kebijakan, memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi, penyusunan SOP perizinan, sistem E-Perizinan pada tahun 2018 dengan pencapaian kinerja rata-rata 90,78 % dengan predikat baik. Pada tahun 2017 rata-rata capain kinerja 90%, yang berarti tidak ada perubahan kegiatan yang signifikan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja DPMPTSP tahun 2018, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja DPMPTSP tahun 2018 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, walaupun melampaui target yang telah ditetapkan, terdapat indikator kinerja yang capaiannya turun dari tahun sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja DPMPTSP tahun 2018 adalah:

1. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi.
2. Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Morowali Utara.
3. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara.
4. Promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif melalui berbagai media.
5. Berjalanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tahun 2018 adalah:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara.
2. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
3. Proyek-proyek yang di tawarkan / di kerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah.
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM
5. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi
6. Dukungan anggaran pada program dan kegiatan DPMPTSP tahun 2018 Belum optimal sesuai dengan kebutuhan anggaran ideal
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Adapun alternatif solusi untuk memperbaiki penurunan capaian kinerja tahun 2018 adalah:

1. Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.

2. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.
3. Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor.
4. Melakukan sosialisasi melalui aparat kewilayahan beserta masyarakat.
5. Optimalisasi dukungan anggaran pada setiap program dan kegiatan.
6. Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan.

d. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit

yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi apabila :
realisasi masukan per unit yang lebih kecil dari target.

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Sumber Daya

NO	Program	Kegiatan	Input		Output		Unit Cost Output		Hasil Perhitungan	Indikasi
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1.	Program Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	537.575.000	537.575.000	537.575.000	537.575.000	537.575.000	537.575.000	100 %	Efisien
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	472.993.646	472.861.210	472.993.646	472.861.210	472.993.646	472.861.210	99,97 %	Efisien
		3. Rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	241.329.394	241.328.500	241.329.394	241.328.500	241.329.394	241.328.500	100 %	Efisien
2.	1. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Meubeleur	46.130.000	46.130.000	46.130.000	46.130.000	46.130.000	46.130.000	100 %	Efisien

3.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	40.000.000	39.908.050	40.000.000	39.908.050	40.000.000	39.908.050	99,77%	Efisien
		2. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	27.365.000	27.365.000	27.365.000	27.365.000	27.365.000	27.365.000	100%	Efisien
		3. Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksana Penanaman Modal	90.941.235	90.940.300	90.941.235	90.940.300	90.941.235	90.940.300	99,99%	Efisien
		4. Penyelenggaraan Pameran Investasi	542.803.806	507.798.000	542.803.806	507.798.000	542.803.806	507.798.000	93,55%	Efisien
		5. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Perizinan dan Penanaman Modal	108.102.700	108.102.700	108.102.700	108.102.700	108.102.700	108.102.700	100%	Efisien

4.	Prgram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Memfasilitasi dan koordinasi Kerjasama Investasi	50.677.000	50.677.000	50.677.000	50.677.000	50.677.000	50.677.000	100%	Efisien
		2. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	77.967.700	78.580.500	77.967.700	78.580.500	77.967.700	78.580.500	100,79%	Tidak efisien
5.	Program Kualitas Pelayanan Publik	1. Pendataan Perizinan dan Non Perizinan	60.607.300	60.607.300	60.607.300	60.607.300	60.607.300	60.607.300	100%	Efisien
		2. Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan	132.766.000	132.766.000	132.766.000	132.766.000	132.766.000	132.766.000	100%	Efisien
		3. Koordinasi Pengaduan, Kebijakandan dan Pelaporan Layanan Perizinan	41.150.000	41.150.000	41.150.000	41.150.000	41.150.000	41.150.000	100%	Efisien
		4. Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan Modal	67.103.950	67.086.000	67.103.950	67.086.000	67.103.950	67.086.000	99,97%	Efisein
		5. Pengumpulan Data dan	79.684.250	79.682.000	79.684.250	79.682.000	79.684.250	79.682.000	100%	Efisien

		Penanganan Pengaduan Ijin dan Kebijakan								
		6. Sosialisasi dan Publikasi Terhadap Pelayanan Publik	30.639.702	30.514.000	30.639.702	30.514.000	30.639.702	30.514.000	99,59%	Efisien
		7. Sinkronisasi Data Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Propinsi	74.889.750	74.685.000	74.889.750	74.685.000	74.889.750	74.685.000	99,72%	Efisien
		8. Sistem E-Perizinan	182.550.000	32.376.000	182.550.000	32.376.000	182.550.000	32.376.000	17,73%	Efisien

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2017-2021 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan peningkatan investasi daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara

berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2018 memaparkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.6

**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik mencapai level "Memuaskan"	- Tersedianya Jasa dan Perlengkapan kantor	100%	100%	Program Pelayanan administrasi perkantoran	537.575.000	537.575.000	100%
		- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	99%		472.993.646	472.861.210	99%
		- Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	100%	100%		241.329.394	246.478.500	100%
		- Jumlah meubelair yang diadakan	100%	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	46.130.000	46.130.000	100%
2	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	- Jumlah Bimbingan Teknis pelayanan publik yang dilaksanakan - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Program peningkatan sumberdaya aparatur		-	-
3	Meningkatnya kedisiplinan SDM Aparatur	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya			Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level "rata-rata baik" untuk setiap SKPD dan LAKIP daerah dengan nilai B	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				-	-	-
5	Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA)	- Terlaksananya Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal	100%	99%	Program Peningkatan promosi dan kerjasama	90.941.235	90.940.300	99%

		- Tersedianya dokumen rencana pembangunan industri Kabupaten.	100%	99%	investasi	67.103.950	67.086.000	99%
		- Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kegiatan promosi	100%	93%		542.803.806	507.798.000	93%
		- Tersedianya referensi untuk evaluasi dan penyusunan rencana investasi dan perizinan	100%	100%		108.102.700	108.102.700	100%
		- Jumlah ketersediaan sarana publikasi perizinan	-			-	-	-
		- Tersedianya data Potensi Unggulan Daerah	100%	100%		40.000.000	39.908.050	99,77%
		- Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	100%	100%		27.365.000	27.365.000	100%
		- Terlaksananya Koordinasi Pengaduan, Kebijakan, dan pelaporan layanan perizinan	100%	100%		41.150.000	41.150.000	100%
6	Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu	- Terlaksananya koordinasi bidang ekonomi	100%	100%	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Daerah	60.607.300	60.607.300	100%
		- Tersedianya dokumen rencana pembangunan industri kabupaten	100%	99%		74.889.750	74.685.000	99%
		- Terlaksananya sosialisasi dan publikasi pelayanan publik di 10 kecamatan	100%	99%		30.639.702	30.514.000	99%
		- Jumlah sistem informasi Penanaman Modal	100%	100%		77.967.700	78.580.500	100%

		-Terlaksananya Pengumpulan data dan penanganan pengaduan izin dan kebijakan di 10 kecamatan	100%	100%		79.684.250	79.682.000	100%
		- Ketersediaan kerjasama dibidang investasi	100%	100%	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	50.677.000	50.677.000	100%
		- Tersedianya SOP pelayanan perizinan	100%	100%		132.766.000	132.766.000	100%
		-Jumlah ketersediaan sarana informasi layanan Perizinan	100%	17%		182.550.000	32.376.000	17,73%

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Pada bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2018, dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang tersurat dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks kepuasan pelayanan publik, Realisasi PMDN dan PMA dan jumlah ijin yang diterbitkan dapat dinyatakan telah mencapai target sasaran.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 terhadap target realisasi kinerja dan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari program kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasi dari hasil kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan rata-rata realisasi diatas 90%
2. Pada belanja langsung program realisasi capaian kegiatan kinerja 100% dan realisasi keuangan rata-rata 97%
3. Hambatan dan permasalahan.
 - a. Program kegiatan untuk belanja kegiatan pada belanja program belum sesuai dengan usulan pada saat perencanaan awal sehingga target kegiatan program hanya menyesuaikan pada anggaran yang tersedia pada akhir tahun anggaran.
 - b. Belum semua pengusaha menyampaikan LKPM sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PMA/PMDN. Hal ini mengakibatkan perkembangan realisasi investasi belum diketahui secara pasti serta berpengaruh terhadap pembinaan yang harus dilakukan kepada investor PMA/PMDN.
 - c. Terhadap perkembangan investasi Kabupaten Morowali Utara, data yang disampaikan baru sampai Triwulan II, sehingga belum memncerminkan data investasi secara keseluruhan.
4. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara.
5. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
6. Terlalu banyaknya perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasi.
7. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

4.2 Langkah Kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMTSPD) Kabupaten Morowali Utara pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2016- 2021.
2. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah (DPMPTSP) khususnya terhadap program pusat dan daerah dengan pengusaha PMA/PMDN yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara.
3. Mengusulkan dan mengkoordinasikan tentang potensi investasi dan nilai investasi terkait penerbitan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Demikian juga terhadap nilai investasi terhadap izin yang dikeluarkan oleh tingkat kecamatan.
4. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang mengacu kepada tahapan pelaksanaan Renstra tahun 2016.
5. Meningkatkan pemantauan pembinaan pengawasan terhadap PMA/PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Morowali Utara.
6. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.
7. Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
8. Melakukan koordinasi kepada OPD pengolah rekomendasi untuk mempedomani SOP PTSP dalam memproses rekomendasi.
9. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi.

